

Post-Western world dan respon Turki

Oleh: Agung Nurwijoyo*

“It is as if a prevailing wind, which powered all the ships at sea, had suddenly ceased to blow. Now, various scattered enemies of those Western values have merged, and there is apparently no one to defend them.”

-David Brooks-

Terminologi *“Post-Western World”* digunakan oleh ilmuwan sosial Brazil Oliver Stuenkel dalam bukunya yang berjudul serupa dan menghadirkan banyak diskusi di berbagai belahan dunia pada saat ini.

Terminologi ini yang juga digunakan oleh kalangan barat dalam menggambarkan transisi global yang terjadi. Dunia *“post-western”* bukanlah alternatif dari peradaban barat melainkan realitas yang dihadapi pada saat ini. Hal ini yang juga diungkapkan oleh Stuenkel yang menunjukkan penolakan akan *“penciptaan fenomena baru, penguatan institusi yang dipimpin kekuatan non-barat.”* Fenomena ini yang dilihat oleh Stuenkel dengan melihat keberadaan aliansi BRICS (Brazil, Russia, India, China dan South Africa). Lantas, bagaimana dengan Turki melihat perubahan di level global ini yang akan membuka pengaruh terhadap dinamika di level regional yang baik langsung atau tidak berbatasan dengan Turki ataupun level domestik Turki sendiri?

Pasca-referendum Turki 16 April lalu dimana 51,4% rakyat Turki setuju terhadap pergantian konstitusi Turki, tantangan besar diberikan kepada pemerintahan Turki di bawah Presiden Recep Tayyip Erdoğan. Tantangan baik di level domestik, regional maupun global dihadapi oleh Turki. Tantangan ini berjalan

bersamaan dengan usaha pencapaian visi 2023 yang dicanangkan pemerintahan *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP). Politik luar negeri yang digambarkan oleh Kılıç Buğra Kanat dari SETA Sebagai politik luar negeri yang mengedepankan sisi pro-aktif dan agenda keamanan nasional.

Dalam kerangka politik luar negeri Turki pasca-referendum lalu, setidaknya Presiden Erdogan sudah merencanakan kunjungan ke berbagai negara strategis di level global: India, Russia, China, AS serta akan mengunjungi pertemuan NATO di akhir bulan Mei. Artinya, bulan Mei 2017 ini merupakan salah satu bulan tersibuk dengan rangkaian lawatan terhadap mitra global Turki disamping adanya beberapa kunjungan ke dan dari negara sahabat Turki seperti terhadap Kuwait, Ghana, Sierra-Leone, dan Kosovo.

Baca juga: [Pasca kemenangan referendum, Erdogan akan mengunjungi India, Russia, China, AS dan Pertemuan NATO](#)

Apa yang dinantikan publik bukan hanya masalah kepemimpinan Turki di bawah Presiden Erdoğan bagaimana berjalan pasca-referendum tetapi yang lebih penting adalah arah politik luar negeri Turki bagaimana akan berjalan kemudian. Hal ini mengingat setidaknya beberapa waktu terakhir Turki menghadapi dinamika domestik dan kawasan yang sangat kuat baik dari adanya kasus SU24 dengan Russia hingga adanya proses normalisasi antara keduanya termasuk di dalamnya kasus pembunuhan terhadap Dubes Russia di Ankara, beberapa kasus serangan terorisme di sejumlah kota di Turki, usaha kudeta gagal yang dilakukan oleh kelompok FETO pada 15 Juli 2016, operasi militer dilakukan di Suriah serta meluas ke wilayah Irak menghadapi kelompok teror PKK-PYD-YPG dan ISIS, serta dinamika yang muncul di masa referendum terutama terhadap sejumlah negara dan aktor di Uni Eropa.

Kondisi tersebut menggambarkan Turki yang menghadapi serangkaian gempuran dari berbagai sisi. Hal ini juga yang menghadirkan kritik dari kolumnis Hurriyet Daily News Murat

Yetkin dimana Turki menghadapi stagnasi dalam politik luar negerinya. Dari berbagai dinamika tersebut, relatif Turki berhasil dalam usaha pengendalian ekonomi dimana salah satu faktor dari nilai tukar lira Turki terhadap dollar AS yang semakin membaik nilainya.

Pasca-referendum, dengan rencana kunjungan ke negara mitra global seperti India, Russia, China dan AS menunjukkan adanya usaha Turki untuk menciptakan satu pola baru dalam politik luar negeri Turki. Tanpa adanya intensi dari langkah Turki “beralih dari barat”, Turki sudah mencoba mencari alternatif lain dalam membangun kemitraan strategis.

Baca juga: [Tank buatan Indonesia – Turki dipamerkan di Istanbul](#)

Pembangunan pangkalan militer di kawasan Somalia pada 2016 lalu mengindikasikan hal yang sama dimana usaha Turki untuk memperluas pengaruhnya semakin terlihat dengan transformasi kerjasama yang dibangun dengan negara-negara Afrika tidak hanya berjalan di level kemanusiaan dan ekonomi seperti yang selama ini berjalan.

Pengaruhnya terhadap kawasan Timur Tengah juga terlihat semakin meluas dengan pembukaan pangkalan militer Turki dan ditempatkan 500-600 militernya di Doha, Qatar. Turki keluar dari pandangan tradisional kawasan dimana respon lebih banyak diberikan terhadap ancaman nyata yang terkait dengan perbatasan. Kedua, bahwa Turki keluar dari pandangan bahwa untuk isu Timur Tengah negara-negara akan cenderung untuk penguatan di wilayah sub-kompleksnya dan Turki yang mulai bermain di sub-kompleks Teluk menindikasikan adanya perubahan dalam pola di kawasan termasuk pola politik luar negeri Turki sendiri.

Disamping itu, salah satu yang menarik dari kunjungan Turki ke kawasan Asia Selatan diantaranya adalah terkait dengan isu sensitif Kashmir (IoK / *India-occupied Kashmir*) dan Nuklir

(Keanggotaan NSG) dimana keduanya merupakan bentuk rivalitas antara Pakistan dan India. Jika Turki bisa memainkan peran diplomasi dalam hubungan antara kedua negara maka akan menaikkan *leverage* Turki di kawasan Asia Selatan. Meskipun demikian, kunjungan terhadap India memiliki potensi dalam peningkatan kerjasama ekonomi antara Turki dan India yang ditargetkan pada 2020 dapat mencapai USD 10 milyar.

Selanjutnya, terhadap China salah satu isu utama adalah tentang proyek *Belt and Road Initiative* yang digagas China. Relasi dengan China dan India kental dengan fokus peningkatan kerjasama ekonomi dengan Turki. bagaimana dengan Russia dan AS? Faktor ekonomi menjadi potensi disamping dalam usaha penyelesaian beberapa masalah krusial terkait dengan keamanan dan ancaman kawasan.

Baca juga: [5 negara Muslim bentuk aliansi keamanan](#)

Turki saat ini berusaha untuk membangun politik luar negeri yang multidimensi. Multidimensi dilihat dari beragamnya aktor negara yang tidak hanya mengandalkan negara-negara barat atau barat sentris. Kedua, multidimensi dilihat juga dari beragamnya isu yang bermain bagi Turki baik dengan penggunaan instrumen *hard-power* ataupun *soft-power*.

Perubahan ini bukan berarti menegasikan Turki dari aspek ancaman yang ada tetapi seakan Turki berusaha politik luar negeri yang dibangun pada saat ini dapat memberikan keuntungan strategis bagi Turki juga dalam usaha perang terhadap teror. Namun, di sisi lain Turki tetap harus berhadapan dengan beberapa masalah lain yang memang dihadapi Turki. Dalam relasi dengan Uni Eropa misalnya, permasalahan pengungsi tetap menjadi salah satu isu penting disamping proses unifikasi Turki ke dalam Uni Eropa. Begitupun masalah yang ada dengan Armenia, Yunani, proses perdamaian di Siprus, hubungan dengan Jerman, Iran, Irak, dan Mesir.

Khusus dalam masalah Suriah dan Irak yang juga menyertakan

multi-aktor baik di level kawasan maupun global seperti AS, Russia, Iran meskipun Turki berada dalam posisi yang tidak mudah, Turki tetap mengedepankan pendekatan unilateral-asertif terutama terhadap aktor yang tidak menjadi mitra bagi aliansinya di kawasan. Hal ini terlihat dari Operasi Perisai Eufkrat yang telah dinyatakan selesai di Suriah Utara dan menyusul kemudian operasi militer yang ditujukan kepada basis kelompok teror PKK di Suriah Utara dan Sinjar, Irak.

Politik luar negeri multidimensi yang dilakukan oleh Turki seakan menggambarkan bahwa Turki bukan berusaha menghindari masalah-masalah yang ada di kawasan dan beberapa stakeholder utama Turki. setidaknya memang di kawasan Timur Tengah disamping Ankara terdapat juga Taheran yang semakin progresif dalam politik luar negerinya sehingga politik luar negeri Turki ini juga dapat dilihat memiliki atensi perimbangan kekuatan terhadap Taheran dalam aspek regional power. Dari politik luar negeri multidimensi ini ada usaha Turki untuk mendiversifikasi pola politik luar negeri yang ada. Artinya, Turki berusaha keluar dari periode stagnasi politik luar negeri yang tidak hanya bergantung kepada barat-sentris melainkan memasuki politik luar negeri yang bersifat multidimensi.

- Mahasiswa Program Magister Universitas Gazi Turki